



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 106 TAHUN 2016

TENTANG

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, perlu disusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 230 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.

- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua

Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
- a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
- a. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
 - b. BKD;
 - c. Badan Diklat; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
- a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;

- c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2016

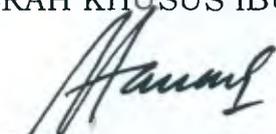
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62079

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
PADA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Badan	1					
	Sekretaris Badan		1				
	a. Kepala Subbagian Umum			1			
	1) Pengurus Barang				1		
	2) Penyimpan Barang				1		
	3) Pengolah Data				2		
	4) Pengadministrasi Umum				1		
	5) Pengadministrasi Pimpinan				1		
	6) Penyiap Berkas				3		
	b. Kepala SubbagianKepegawaian			1			
	1) Pengelola Kepegawaian				1		
	2) Pengolah Data				1		
	3) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	c. Kepala Subbagian Program dan Anggaran			1			
	1) Pengelola Perencanaan Anggaran				1		
	3) Pengadministrasi Perencanaan Anggaran				2		
	d. Kepala Subbagian Keuangan			1			
	1) Bendaharawan Pengeluaran				1		
	2) Bendaharawan Penerimaan				1		
	2) Verifikator Keuangan				1		
	3) Pengolah Data				1		
	4) Pengadministrasi Keuangan				1		
2	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan		1				

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Kepala Subbidang Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air			1			
	1) Analis Pengawasan Pencemaran Air Limbah				2		
	2) Pengadministrasi Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air				2		
	3) Pengawas Lingkungan Hidup Pertama (JFT)					3	
	b. Kepala Subbidang Pengawasan Pengendalian Pencemaran Udara			1			
	1) Analis Pengawasan Pengendalian Pencemaran Udara				2		
	2) Pengadministrasi Pengendalian Pencemaran Udara				2		
	3) Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama					3	
	c. Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran B3 dan Limbah Padat			1			
	1) Analis Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran B3 dan Limbah Padat				2		
	2) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran B3 dan Limbah Padat				2		
	3) Pengawas Lingkungan Hidup Pertama (JFT)					3	
3	Kepala Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan		1				
	a. Kepala Subbidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan			1			
	1) Analis Mengenai Dampak Lingkungan				2		
	2) Pengadministrasi Analis Mengenai Dampak Lingkungan				2		
	3) Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana Lanjut					3	
	b. Kepala Subbidang Pengendalian Implementasi Dokumen Lingkungan			1			

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Analisis Pengendalian Implementasi Dokumen Lingkungan				1		
	2) Pengadministrasi Pengendalian Implementasi Dokumen Lingkungan				2		
	3) Pengawas Lingkungan Hidup					3	
	4) Penyiap/Pramubakti				1		
	c. Kepala Subbidang Pemanfaatan Sumberdaya Berkelanjutan			1			
	1) Analisis Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Berkelanjutan				1		
	2) Pengadministrasi Pengelolaan Sumberdaya Berkelanjutan				2		
	3) Pengendali Dampak Lingkungan					2	
4	Kepala Bidang Penataan Hukum di Lingkungan		1				
	a. Kepala Subbidang Pengkajian Peraturan Kebijakan Lingkungan			1			
	1) Analisis Pengkajian Peraturan Kebijakan Lingkungan				1		
	2) Pengadministrasi Pengkajian Peraturan Kebijakan Hukum				2		
	3) Pengendali Dampak Lingkungan					2	
	b. Kepala Subbidang Pengaduan Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan			1			
	1) Analisis Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan				1		
	2) Pengadministrasi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan				1		
	3) Penyiap Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan				2		
	4) Pengawas Lingkungan Hidup					3	
	c. Kepala Subbidang Penegakan Hukum Lingkungan			1			
	1) Analisis Penegakan Hukum Lingkungan				1		
	2) Pengadministrasi Penegakan Hukum Lingkungan				1		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Pengawas Penegakkan Hukum Lingkungan				3		
5	Kepala Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan		1				
	a. Kepala Subbidang Perencanaan dan Tata			1			
	1) Analis Perencanaan dan Tata Lingkungan				1		
	2) Pengolah Data Perencanaan dan Tata Lingkungan				1		
	3) Pengadministrasi Perencanaan dan Tata Lingkungan				1		
	4) Pengendali Dampak Lingkungan					1	
	b. Kepala Subbidang Perubahan Iklim			1			
	1) Analis Perubahan Iklim				2		
	2) Pengadministrasi Perubahan Iklim				1		
	3) Pengawas Lingkungan Hidup Pertama					3	
	c. Kepala Subbidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan			1			
	1) Analis Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan				3		
	2) Pengadministrasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				1		
	3) Pengendali Dampak Lingkungan					1	
6	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha KPLH Kota Administrasi Jakarta Pusat			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Verifikator Keuangan				1		
	4) Pengolah Program Dan Anggaran				1		
	5) Pengadministrasi Umum				2		
	b. Kepala Subbidang Pelestarian dan Tata Lingkungan			1			
	1) Analis Pelestarian dan Tata Lingkungan				1		
	2) Pengadministrasi Pelestarian dan Tata Lingkungan				2		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Pengendali Dampak Lingkungan					2	
	c. Kepala Subbidang Pencegahan Dampak Lingkungan			1			
	1) Analis Pencegahan Dampak Lingkungan				2		
	2) Pengadministrasi Pencegahan Dampak Lingkungan				1		
	3) Pengendali Dampak Lingkungan					2	
	d. Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan			1			
	1) Analis Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan				1		
	2) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan				1		
	3) Pengawas Lingkungan Hidup Pertama					3	
	e. Kepala Subbidang Penataan Hukum Lingkungan			1			
	1) Analis Penataan Hukum Lingkungan				1		
	2) Pengadministrasi Penataan Hukum Lingkungan				1		
	3) Pengawas Lingkungan Hidup					3	
7	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Verifikator Keuangan				1		
	4) Pengolah Program Dan Anggaran				1		
	5) Pengadministrasi Umum				2		
	b. Kepala Subbidang Pelestarian dan Tata Lingkungan			1			
	1) Analis Pelestarian dan Tata Lingkungan				1		
	2) Pengadministrasi Pelestarian dan Tata Lingkungan				2		
	3) Pengendali Dampak Lingkungan					2	

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Kepala Subbidang Pencegahan Dampak Lingkungan			1			
	1) Analis Pencegahan Dampak Lingkungan				1		
	2) Pengolah Data Pencegahan Dampak Lingkungan				2		
	3) Pengendali Dampak Lingkungan					2	
	d. Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan			1			
	1) Analis Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan				1		
	2) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan				1		
	3) Pengawas Lingkungan Hidup Pertama					3	
	e. Kepala Subbidang Penataan Hukum Lingkungan			1			
	1) Analis Penataan Hukum Lingkungan				1		
	2) Pengadministrasi Penataan Hukum Lingkungan				1		
	3) Pengawas Lingkungan Hidup					3	
8	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Verifikator Keuangan				1		
	4) Pengolah Program Dan Anggaran				1		
	5) Pengadministrasi Umum				2		
	b. Kepala Subbidang Pelestarian dan Tata Lingkungan			1			
	1) Analis Pelestarian dan Tata Lingkungan				1		
	2) Pengadministrasi Pelestarian dan Tata Lingkungan				2		
	3) Pengendali Dampak Lingkungan					2	
	c. Kepala Subbidang Pencegahan Dampak Lingkungan			1			
	1) Analis Pencegahan Dampak Lingkungan				1		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Pengadministrasi Pencegahan Dampak Lingkungan				2		
	3) Pengendali Dampak Lingkungan					2	
	d. Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan			1			
	1) Analis Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan				1		
	2) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan				1		
	3) Pengendali Dampak Lingkungan					2	
	e. Kepala Subbidang Penataan Hukum Lingkungan			1			
	1) Analis Penataan Hukum Lingkungan				1		
	2) Pengadministrasi Penataan Hukum Lingkungan				1		
	3) Pengawas Lingkungan Hidup					3	
9	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Verifikator Keuangan				1		
	4) Pengolah Program Dan Anggaran				1		
	5) Pengadministrasi Umum				1		
	b. Kepala Subbidang Pelestarian dan Tata Lingkungan			1			
	1) Analis Pelestarian dan Tata Lingkungan				1		
	2) Pengadministrasi Pelestarian dan Tata Lingkungan				2		
	3) Pengendali Dampak Lingkungan					2	
	c. Kepala Subbidang Pencegahan Dampak Lingkungan			1			
	1) Analis Pencegahan Dampak Lingkungan				1		
	2) Pengadministrasi Pencegahan Dampak Lingkungan				2		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Pengendali Dampak Lingkungan					2	
	d. Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan			1			
	1) Analisis Pengawasan dan Pengendalian				1		
	2) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan				2		
	3) Pengawas Lingkungan Hidup					3	
	e. Kepala Subbidang Penataan Hukum Lingkungan			1			
	1) Analisis Penataan Hukum Lingkungan				1		
	2) Pengadministrasi Penataan Hukum Lingkungan				2		
	3) Pengawas Lingkungan Hidup					3	
10	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Verifikator Keuangan				1		
	4) Pengolah Program Dan Anggaran				1		
	5) Pengadministrasi Umum				2		
	b. Kepala Subbidang Pelestarian dan Tata Lingkungan			1			
	1) Analisis Pelestarian dan Tata Lingkungan				1		
	2) Pengadministrasi Pelestarian dan Tata Lingkungan				2		
	3) Pengendali Dampak Lingkungan					3	
	c. Kepala Subbidang Pencegahan Dampak Lingkungan			1			
	1) Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan				1		
	2) Pengolah Data Pencegahan Dampak Lingkungan				2		
	3) Pengendali Dampak Lingkungan					3	
	d. Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan			1			

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Analis Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan				1		
	2) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan				2		
	3) Pengawas Lingkungan Hidup					3	
	e. Kepala Subbidang Penataan Hukum Lingkungan			1			
	1) Analis Penataan Hukum Lingkungan				1		
	2) Pengadministrasi Penataan Hukum Lingkungan				2		
	3) Pengawas Lingkungan Hidup					3	
11	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha KPLH Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Verifikator Keuangan				1		
	4) Pengolah Program Dan Anggaran				1		
	5) Pengadministrasi Umum				2		
	b. Kepala Subbidang Pencegahan Kerusakan Lingkungan Pantai dan Laut			1			
	1) Analis Pencegahan Kerusakan Lingkungan Pantai dan Laut				1		
	2) Pengadministrasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan Pantai dan Laut				1		
	3) Pengendali Dampak Lingkungan					1	
	c. Kepala Subbidang Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Biotik			1			
	1) Analis Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Biotik				1		
	2) Pengadministrasi Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Biotik				1		
	3) Pengawas Lingkungan Hidup					3	
12	Kepala Kantor Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah		1				

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha Laboratorium			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Pengelola Barang				2		
	3) Pengolah Program dan Anggaran				1		
	4) Pengadministrasi Keuangan				1		
	5) Pengadministrasi Umum				2		
	6) Penyiap/Pramubakti				1		
	b. Kepala Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian			1			
	1) Analis Data Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian				1		
	2) Pemroses Contoh Uji				10		
	3) Petugas Laboratorium				1		
	4) Pedal Ahli Muda					4	
	5) Pedal Ahli Pertama					6	
	6) Pedal Pelaksana Lanjutan					6	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Manajemen Mutu			1			
	1) Pengelola Sistem Terakreditasi				2		
	2) Operator Mesin				1		
	JUMLAH	1	12	47	181	98	
	JUMLAH TOTAL				339		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA